MEJORA : Medical Journal Awatara
Vol. 4, No. 2, April 2026, pp. 323- 330
ISSN: 30259584, DOI: 10.61434/mejora.v4i2.353

Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di Puskesmas Kapontori Buton

Wa Ode Muthya Yusrin[1], Irma[2]*, Lade Albar Kalza[3]
[1]Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, muthyawaode@gmail.com
[2]Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, irmankedtrop15@uho.ac.id
[3]Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

A R T I C L E I N F O
History of the article:
Received June, 04, 2026
Revised June, 28, 2026
Accepted June,30, 2026

Keywords:
BPJS Non-Wage Workers
Compliance in Paying Contributions
Community Health Centers

ABSTRACT

Compliance of Non-Wage Recipient Participants (PBPU) in paying contributions is a challenge for the sustainability of the National Health Insurance (JKN). At the Kapontori Community Health Center, the arrears rate reached 47.6%, which risks hampering service accessibility. This study aims to identify factors related to compliance in paying BPJS Mandiri contributions in the Kapontori Community Health Center working area, Buton Regency. This quantitative study used a cross-sectional analytical survey design, conducted from April 2–27, 2026. The study population was service users categorized as BPJS Mandiri participants, with a sample of 164 respondents using a total sampling technique. Primary data were collected through structured questionnaire interviews and then analyzed using the chi-square test (α = 0.05). The respondent compliance rate was 52.4% (compliant) and 47.6% (non-compliant). The majority of respondents were aged 21–30 years (30.5%), female (55.5%), chose class 3 care (89.6%), had a high school/senior high school education (51.8%), and were unemployed/housewives (36.6%). Bivariate analysis showed a significant relationship between income (p = 0.008) and motivation (p = 0.000) and contribution compliance. Conversely, knowledge (p = 0.740) and service quality (p = 0.118) did not show a significant relationship. The study concluded that there is a relationship between income and motivation and compliance with independent BPJS contributions among patients using health services in the Kapontori Community Health Center, Buton Regency.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kata Kunci :
BPJS PBPU
Kepatuhan Membayar Iuran
Puskesmas

Corresponding Author:
Irma
Universitas Halu Oleo
Kendari
irmankedtrop15@uho.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) membayar iuran merupakan tantangan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di Puskesmas Kapontori, angka tunggakan mencapai 47,6%, yang berisiko menghambat aksesibilitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Kapontori, Kabupaten Buton. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain survei analitik pendekatan cross-sectional, dilaksanakan 2–27 April 2026. Populasi studi adalah pasien pengguna layanan berkategori peserta BPJS Mandiri, dengan sampel 164 responden melalui teknik total sampling. Data primer dikumpulkan lewat wawancara kuesioner terstruktur lalu dianalisis menggunakan uji chi-square (α = 0,05). Angka kepatuhan responden sebesar 52,4% (patuh) dan 47,6% (tidak patuh). Mayoritas responden berusia 21–30 tahun (30,5%), perempuan (55,5%), memilih kelas perawatan 3 (89,6%), berpendidikan SMA/SLTA (51,8%), dan tidak bekerja/IRT (36,6%). Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendapatan (p = 0,008) serta motivasi (p = 0,000) dengan kepatuhan iuran. Sebaliknya, pengetahuan (p = 0,740) dan mutu pelayanan (p = 0,118) tidak menunjukkan hubungan signifikan. Kesimpulan dari penelitian adanya hubungan pendapatan dan motivasi dengan kepatuhan membayar iiuran BPJS mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dilindungi bagi setiap individu, termasuk warga Indonesia. *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi bagian penting dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah, masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan layanan untuk menanggung biaya rawat inap dan membeli obat-obatan yang belum sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan [1].

Keberadaan JKN dalam masyarakat dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembayaran iuran JKN secara rutin, khususnya bagi peserta mandiri demi keberlanjutan program JKN [2]. Ketidak patuhan dalam pembayaran premi lebih didominasi oleh peserta mandiri atau biasa disebut Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), hal ini disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dan komitmen terhadap kepesertaaan sebagai filosofi BPJS Kesehatan sebagaima tercantum dalam UU BPJS yaitu, kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta [3].

Jumlah peserta BPJS Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 8.071.716 jiwa. Rincian peserta BPJS di Sulawesi tenggara sebagai berikut: PBI yang bersumber dari APBN sebanyak 3.177.016 jiwa 19,22%, PBI yang 4 bersumber dari APBD sebanyak 2.377.998 jiwa 17,42%, non PBI kategori PPU sebanyak 1.154.588 jiwa 20,03%, dan PBPU sebanyak 1.135.134 13,60% jiwa (BPJS Kesehatan, 2024).

Berdasarkan data sekunder BPJS kesehatan yang diperoleh peneliti, jumlah peserta JKN di Kabupaten Buton per September 2025 mencapai 100.088 jiwa (82,23%). Jumlah peserta mandiri di Kabupaten Buton per September 2025 adalah 2.268 jiwa (57,25%), dari seluruh peserta mandiri tersebut terdapat 1.299 jiwa (57,2%) peserta yang aktif dan 969 jiwa (42,8%) peserta yang menunggak (nonaktif).

Berdasarkan data sekunder BPJS kesehatan yang diperoleh peneliti, jumlah peserta BPJS mandiri di wilayah kerja Puskesmas Kapontori per September sebanyak 164 jiwa. Jumlah peserta aktif terdapat 86 jiwa (52,4%), sementara jumlah peserta nonaktif terdapat 78 jiwa (47,6%). Meskipun jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, realita di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran secara tepat waktu [4], [5]. Fenomena tunggakan iuran ini menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, mengingat ketidakteraturan pembayaran berdampak langsung pada stabilitas pembiayaan kesehatan di fasilitas tingkat pertama [6]. Tingginya angka tunggakan di Puskesmas Kapontori yang hampir mencapai separuh dari total peserta mandiri menjadi alasan kuat mengapa penelitian ini penting dilakukan di lokasi tersebut. Peneliti memandang bahwa karakteristik masyarakat di wilayah ini perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan mereka, terutama bagi masyarakat yang sudah merasakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas namun masih berstatus menunggak.

Hasil wawancara mendalam terhadap 10 responden awal memperkuat kondisi ini, di mana 6 orang di antaranya memiliki pengetahuan yang rendah mengenai sistem denda dan menganggap kartu bisa diaktifkan seketika hanya saat akan digunakan. Dari sisi pendapatan, 7 responden mengaku kesulitan membayar rutin akibat penghasilan yang tidak menentu, sehingga memicu rendahnya motivasi untuk mendahulukan iuran kesehatan dibandingkan kebutuhan pokok. Selain itu ada persepsi mutu pelayanan yang kurang memuaskan, di mana terdapat 4 responden secara tegas mengeluhkan proses rujukan yang prosesnya lama. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan di wilayah Puskesmas Kapontori bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan akumulasi dari kurangnya edukasi dan ketidakpuasan terhadap layanan Puskesmas.

Hal ini menandakan bahwa masih banyaknya peserta PBPU atau mandiri yang tidak membayar iuran tepat waktu. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul "faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei analitik menggunakan desain *cross-sectional* yang bertujuan memperoleh informasi kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien pengguna pelayanan kesehatan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, dengan sampel sebanyak 164 responden yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan secara primer melalui wawancara

langsung menggunakan instrumen kuesioner terstruktur. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik *chi-square* menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data sebanyak 164 responden yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton yang diisi menggunakan kuisioner pada tanggal 2-27 April 2026. Hasil tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
<20 Tahun	7	4,3
21-30 Tahun	50	30,5
31-40 Tahun	30	18,3
41-50 Tahun	36	22,0
51-60 Tahun	37	22,6
61-70 Tahun	4	2,4
Jenis Kelamin		
Laki-laki	73	44,5
Perempuan	91	55,5
Kelas Perawatan		
Kelas 1	11	6,7
Kelas 2	6	3,7
Kelas 3	147	89,6
Pendididkan Terakhir		
Tidak Sekolah	1	0,6
SD	12	7,3
SMP/SLTP	24	14,6
SMA/SLTA	85	51,8
Perguruan Tinggi	42	25,6
Pekerjaan		
Petani	37	22,6
Wiraswasta/Pedagang	27	16,5
Karyawan Swasta	7	4,3
Honorer	18	11,0
Nelayan	15	9,1
Tidak Bekerja/IRT	60	36,6
Total	**164**	**100**

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 164 responden didominasi oleh usia 21-30 tahun sebanyak 50 orang (30,5%). Sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 91 orang (55,5%). Kelas perawatan didominasi oleh kelas 3 yaitu sebanyak 147 orang (89,6%). Tingkat Pendidikan didominasi pada tingkat SMA/SLTA, yaitu sebanyak 85 orang (51,8%). Pekerjaan didominasi oleh kelompok tidak bekerja/IRT yaitu sebanyak 60 orang (36,6%).

Tabel 1. Analisis Univariat

Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kepatuhan Membayar		
Patuh	86	52,4
Tidak patuh	78	47,6
Pengetahuan		
Tinggi	111	67,7
Rendah	53	32,3
Pendapatan		
Rendah	110	67,1
Tinggi	54	32,9

Motivasi		
Positif	119	72,6
Negatif	45	27,4
Mutu Pelayanan		
Baik	151	92,1
Kurang Baik	13	7,9
Total	**164**	**100**

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dari total 164 responden, sebagian responden tergolong patuh yaitu sebanyak 86 orang (52,4%), sementara itu terdapat 78 orang (47,6%) yang tidak patuh. Sementara itu untuk tingkat pengetahuan didominasi oleh kategori tinggi sebanyak 111 orang (67,7%), tingkat pendapatan didominasi oleh kategori rendah sebanyak 110 orang (67,1%), tingkat motivasi didominasi oleh kategori positif sebanyak 119 orang (72,6%), serta penilaian terhadap mutu pelayanan yang didominasi oleh kategori baik yaitu sebanyak 151 orang (92,1%).

Tabel 2. Analisis Bivariat

Variabel	**Frekuensi**				**Total**		***P.Value***
	Kepatuhan Membayar						
	Patuh		**Tidak Patuh**				
	n	**%**	**n**	**%**	**n**	**%**	
Pengetahuan							
Tinggi	57	34,8	54	32,9	111	67,7	
Rendah	29	17,7	24	14,6	53	32,3	**0,740**
Total	86	52,5	78	47,5	164	100	
Pendapatan							
Tinggi	36	22,0	18	11,0	54	32,9	
Rendah	50	30,5	60	36,6	110	67,1	**0,008**
Total	86	52,5	78	47,6	164	100	
Motivasi							
Positif	86	52,4	33	20,2	119	72,6	
Negatif	0	0,0	45	27,4	45	27,4	**0,000**
Total	86	52,4	78	47,6	164	100	
Mutu Pelayanan							
Baik	83	50,6	68	41,5	151	92,1	
Kurang Baik	3	1,8	10	6,1	13	7,9	**0,118**
Total	86	52,4	78	47,6	164	100	

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square terhadap 164 responden, diperoleh bahwa sebanyak 86 responden (52,4%) patuh dan 78 responden (47,6%) tidak patuh dalam membayar iuran. Hasil uji menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar (p = 0,740). Demikian pula mutu pelayanan tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan membayar (p = 0,118). Sebaliknya, pendapatan berhubungan signifikan dengan kepatuhan membayar (p = 0,008), di mana responden dengan pendapatan tinggi lebih banyak yang patuh dibandingkan yang berpendapatan rendah. Selain itu, motivasi juga menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan kepatuhan membayar (p = 0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan faktor yang berkaitan dengan kepatuhan responden dalam membayar iuran.

Hubungan antara Pengetahuan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapontori Kab. Buton

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 3, dari 164 responden yang diteliti, sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan tinggi (67,7%). Pada kelompok ini, responden yang patuh membayar iuran lebih banyak dibandingkan yang tidak patuh, yaitu sebanyak 57 orang (34,8%). Namun, hasil uji statistik menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,740, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran.

Pengetahuan merupakan fondasi kognitif yang memengaruhi pemahaman peserta mengenai hak dan kewajibannya, termasuk pentingnya membayar iuran jaminan kesehatan secara rutin [7]. Namun, hasil uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini menghasilkan nilai $p = 0{,}740$ ($p > 0{,}05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di wilayah kerja Puskesmas

Kapontori Kabupaten Buton. Secara statistik, ketiadaan hubungan ini disebabkan oleh sebaran data yang merata, di mana responden dengan tingkat pengetahuan tinggi maupun rendah menunjukkan pola perilaku yang relatif sama dalam hal kepatuhan membayar iuran.

Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa tingginya pengetahuan tidak serta-merta menjamin kepatuhan. Sebagian responden yang memahami regulasi BPJS Kesehatan tetap tidak patuh akibat kendala ekonomi, pendapatan yang tidak menentu, serta adanya prioritas kebutuhan rumah tangga yang lebih mendesak. Sebaliknya, responden dengan pengetahuan terbatas justru tetap patuh membayar karena didorong oleh rasa khawatir dan kebutuhan akan proteksi kesehatan saat jatuh sakit.

Fenomena ini selaras dengan teori perilaku Lawrence Green, yang menegaskan bahwa pembentukan perilaku kesehatan tidak hanya ditentukan oleh faktor predisposisi (*predisposing factors*) seperti pengetahuan, melainkan juga sangat bergantung pada faktor pendukung (*enabling factors*) seperti kemampuan finansial dan aksesibilitas, serta faktor pendorong (*reinforcing factors*) dari lingkungan [8]. Oleh karena itu, pengetahuan yang baik kehilangan daya tekannya terhadap perilaku kepatuhan jika tidak ditopang oleh stabilitas ekonomi tanggungan peserta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [9] di Kelurahan Paniki Bawah ($p = 0{,}078$) serta Pangestu et al. (2026) di Kota Jakarta ($p = 0{,}291$) yang sama-sama menemukan bahwa tingkat pengetahuan bukan merupakan prediktor utama yang berhubungan signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN, khususnya pada segmen peserta bukan penerima upah (PBPU).

Hubungan antara Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapontori Kab. Buton

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 3 dari 164 responden yang diteliti, variabel pendapatan didominasi oleh responden dengan pendapatan rendah (67,1%), dan sebagian besar dari kelompok tersebut tidak patuh membayar iuran, yaitu sebanyak 60 orang (36,6%). Hasil analisis statistik memperoleh nilai *p-value* sebesar 0,008, yang mengindikasikan adanya hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan membayar iuran.

Pendapatan merupakan indikator kemampuan finansial yang menentukan kapasitas seseorang dalam mengalokasikan pengeluaran [10]. Hasil uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini menghasilkan nilai $p = 0{,}008$ ($p < 0{,}05$), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton. Keberadaan hubungan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama yang mengontrol kedisiplinan peserta dalam memenuhi kewajiban bulannya.

Temuan ini diperkuat oleh teori perilaku Lawrence Green, yang menempatkan pendapatan sebagai faktor pendukung (*enabling factors*). Pendapatan berfungsi sebagai sumber daya finansial yang memfasilitasi atau memungkinkan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku kesehatan [8]. Peserta dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki kelonggaran finansial untuk membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Sebaliknya, peserta dengan pendapatan rendah menghadapi dilema alokasi dana, di mana mereka terpaksa memprioritaskan kebutuhan pokok jangka pendek (seperti pangan dan kebutuhan rumah tangga harian) di atas iuran jaminan kesehatan. Hambatan ekonomi inilah yang memicu terjadinya tunggakan dan ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [9] di Kelurahan Paniki Bawah ($p = 0{,}078$) serta Pangestu et al. (2026) di Kota Jakarta ($p = 0{,}291$) yang sama-sama menemukan bahwa tingkat pengetahuan bukan merupakan prediktor utama yang berhubungan signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN, khususnya pada segmen peserta bukan penerima upah (PBPU).

Hubungan antara Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapontori Kab. Buton

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 3 dari 164 responden yang diteliti, variabel pendapatan didominasi oleh responden dengan pendapatan rendah (67,1%), dan sebagian besar dari kelompok tersebut tidak patuh membayar iuran, yaitu sebanyak 60 orang (36,6%). Hasil analisis statistik memperoleh nilai *p-value* sebesar 0,008, yang mengindikasikan adanya hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan membayar iuran.

Pendapatan merupakan indikator kemampuan finansial yang menentukan kapasitas seseorang dalam mengalokasikan pengeluaran [10]. Hasil uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini menghasilkan nilai $p = 0{,}008$ ($p < 0{,}05$), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton. Keberadaan hubungan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama yang mengontrol kedisiplinan peserta dalam memenuhi kewajiban bulannya.

Temuan ini diperkuat oleh teori perilaku Lawrence Green, yang menempatkan pendapatan sebagai faktor pendukung (*enabling factors*). Pendapatan berfungsi sebagai sumber daya finansial yang memfasilitasi atau memungkinkan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku kesehatan [8]. Peserta dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki kelonggaran finansial untuk membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Sebaliknya, peserta dengan pendapatan rendah menghadapi dilema alokasi dana, di mana mereka terpaksa memprioritaskan kebutuhan pokok jangka pendek (seperti pangan dan kebutuhan rumah tangga harian) di atas iuran jaminan kesehatan. Hambatan ekonomi inilah yang memicu terjadinya tunggakan dan ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [11] di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur (p = 0,000) serta [10] di Puskesmas Kecamatan Kalideres (p = 0,0004). Kedua penelitian terdahulu tersebut juga membuktikan adanya hubungan linier yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran pada segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hubungan antara Motivasi dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapontori Kab. Buton

Berdasarkan Tabel 3 dari 164 responden yang diteliti mayoritas responden memiliki motivasi positif (72,6%), dan seluruh responden dalam kelompok ini, yaitu sebanyak 86 orang (52,4%), tercatat patuh membayar iuran tanpa ditemukan responden yang tidak patuh. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000, yang berarti terdapat hubungan antara motivasi dan tingkat kepatuhan membayar iuran.

Motivasi merupakan stimulan psikologis, baik yang bersumber dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) diri individu, yang menggerakkan kesadaran peserta untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara rutin [4]. Hasil uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini menghasilkan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Temuan ini menegaskan adanya hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton.

Berdasarkan teori perilaku Lawrence Green, motivasi diklasifikasikan sebagai faktor predisposisi (*predisposing factors*) yang mengawali atau melandasi terbentuknya suatu perilaku kesehatan [8]. Dalam konteks ini, motivasi positif bertindak sebagai dorongan internal yang kuat terkait kesadaran akan esensi jaminan kesehatan sebagai proteksi risiko finansial di masa depan (*perceived benefit*). Responden dengan motivasi tinggi memiliki keyakinan bahwa iuran yang dibayarkan merupakan bentuk investasi sosial yang mempermudah akses pengobatan saat jatuh sakit, sehingga mereka tetap konsisten membayar meskipun jarang memanfaatkan layanan kesehatan. Sebaliknya, responden dengan motivasi rendah cenderung bersifat reaktif dan menganggap iuran BPJS bukan prioritas utama saat kondisi fisik mereka sehat, yang pada akhirnya memicu perilaku menunggak atau tidak patuh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [12] di Puskesmas Lubuk Basung Kabupaten Agam (p = 0,000) serta [13] di Kecamatan Tasikmadu (p = 0,000) yang menunjukkan bahwa motivasi intrinsik maupun ekstrinsik merupakan prediktor dominan yang berhubungan langsung secara signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran JKN pada kategori kepesertaan mandiri (Non-PBI).

Hubungan antara Mutu Pelayanan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kapontori Kab. Buton

Berdasarkan Tabel 3 dari 164 responden yang diteliti, sebagian besar responden menilai pelayanan yang diterima sudah baik (92,1%), dengan 83 orang (50,6%) di antaranya menunjukkan kepatuhan dalam membayar iuran. Meskipun demikian, hasil uji statistik menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,118, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran.

Mutu pelayanan kesehatan merupakan akumulasi penilaian pasien terhadap dimensi *reliability*, *assurance*, *tangibles*, *empathy*, dan *responsiveness* yang disediakan oleh fasilitas kesehatan [14]. Hasil uji statistik *chi-square* dalam penelitian ini menghasilkan nilai p = 0,118 (p > 0,05), yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara mutu pelayanan kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton. Hasil ini mengindikasikan bahwa baik atau buruknya kualitas layanan yang dirasakan oleh peserta bukan merupakan prediktor utama yang mengontrol kedisiplinan mereka dalam menunaikan kewajiban finansial bulanan.

Berdasarkan teori perilaku Lawrence Green, mutu pelayanan dikategorikan sebagai faktor pendorong (*reinforcing factors*) yang idealnya berfungsi memperkuat tindakan kesehatan [8]. Namun, ketiadaan hubungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong tersebut kehilangan signifikansinya. Fenomena lapangan mengonfirmasi

bahwa responden yang mempersepsikan mutu pelayanan kurang baik tetap berupaya patuh membayar iuran. Hal ini didasari oleh prinsip proteksi diri, di mana motivasi untuk menghindari risiko biaya pengobatan yang mahal saat jatuh sakit jauh lebih dominan daripada penilaian subjektif mereka terhadap kenyamanan pelayanan puskesmas (seperti proses rujukan yang lama dan peralatan medis yang belum lengkap). Iuran BPJS tetap dibayar karena dipandang sebagai kebutuhan jaminan finansial yang bersifat esensial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [15] di Kelurahan Bello, Kota Kupang (p = 0,068) yang juga menemukan tidak adanya hubungan signifikan antara mutu pelayanan dengan kemauan atau kepatuhan membayar iuran peserta PBPU. Hal ini menegaskan bahwa pada segmen peserta mandiri, keputusan untuk patuh membayar iuran lebih banyak digerakkan oleh faktor internal (*predisposing*) dan kapasitas ekonomi (*enabling*) ketimbang faktor eksternal dari fasilitas pelayanan kesehatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendapatan dan motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton. Disisi lain, tidak ada hubungan antara pengetahuan dan mutu pelayanan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri pada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kapontori Kabupaten Buton.

REFERENSI

.

[1] E. Suyanti, I. Afrita, and S. Oktapani, “Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia,” vol. 4, pp. 7123–7130, 2024.

[2] B. K. Oktari, V. Angelina, W. Wandila, and B. N. Rahmadita, “Kesadaran Warga Negara Terhadap Kewajiban Membayar Iuran BPJS Sebagai Cerminan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Dalam Kehidupan Bernegara,” vol. 2, no. 1, 2025.

[3] S. N. Kuraini, A. N. Anggraini, N. T. Surya, A. K. Tyas, and F. Widyastuti, “Sosialiasi Program JKN melalui BPJS Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal Di RW 29, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta,” *Lontara Abdimas J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 94–101, 2023, doi: 10.53861/lomas.v4i2.378.

[4] H. Rosdiana, D. Nurmawaty, A. Heryana, and A. Irfandi, “MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI PADA UNIT RAWAT JALAN PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES TAHUN 2023,” vol. 2, no. 3, pp. 1–6, 2023.

[5] F. Findayani, N. Yuniar, and J. Saimin, “ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN BPJS MANDIRI PASCA KENAIKAN IURAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABELI KOTA KENDARI,” *J. Ilm. Mhs. Kesehat. Masy.*, vol. 6, no. 4, Oct. 2021, doi: 10.37887/jimkesmas.v6i4.23479.

[6] Nur Aziza Ramadani, Haeruddin, and A. S. Batara, “Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri,” *Window Public Health J.*, vol. 1, no. 6, pp. 609–619, May 2021, doi: 10.33096/woph.v1i6.336.

[7] G. D. Rahmadiane, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kemauan Membayar Iuran Kabupaten Tegal Pendahuluan,” vol. 2, 2022.

[8] M. Pakpahan *et al.*, *Promosi Kesehatan & Perilaku Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

[9] E. G. Kalalo, A. A. Tucunan, and A. Rumayar, “Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri yang membayar iuran jaminan kesehatan nasional di kelurahan paniki bawah,” vol. 4, no. September, pp. 3878–3886, 2023.

[10] Rahmatillah, S. Lastri, and H. Hasnur, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri,” vol. 8, no. 1, pp. 53–65, 2025.

[11] Rahmasari, R. Zakiah, and Nina, "Hubungan Antara Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Akses Pembayaran, Pengetahuan, dan Persepsi dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Pbpu Pekerja Mandiri," *Isjmhs*, vol. 03, no. 02, pp. 63–71, 2023.
[12] M. Novita, S. Handayani, I. Y. Darma, and Edison, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam," vol. 13, pp. 204–217, 2022.
[13] M. S. Hapsari and A. Pujilestari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI di Kecamatan Tasikmadu The Factors That Inluence Compliance With BPJS Kesehatan Contribution Payments For Non PBI Participants In Tasikmadu Subdistrict," vol. 7, no. 2, pp. 44–51, 2024.
[14] H. Idris, *Mutu Pelayanan Kesehatan*. Palembang: Unsri Press, 2019.
[15] Y. Y. Tuan and D. O. Dodo, "Media Kesehatan Masyarakat FACTORS RELATED TO ABILITY AND WILLINGNESS TO PAY HEALTH INSURANCE IN NON-WAGE WORKERS Media Kesehatan Masyarakat," vol. 5, no. 3, pp. 97–106, 2023.